

**BAHAN AJAR**  
**PROGRAMA PENYULUH PERTANIAN**



**PENYULUH PERTANIAN ALIH KELOMPOK**

KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

**BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN - BATU**

Jln. Songgoriti No. 24 Kotak Pos 17 Batu - Jawa Timur

Telp. 0341 591302 Fax. 0341 597032 Website : [www.bbppbatu.bpsdmp.deptan.go.id](http://www.bbppbatu.bpsdmp.deptan.go.id)

**TAHUN 2012**

# **BAHAN AJAR**

## **PROGRAMA PENYULUH PERTANIAN**



### **PENYULUH PERTANIAN ALIH KELOMPOK**

KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

**BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN - BATU**

Jln. Songgoriti No. 24 Kotak Pos 17 Batu - Jawa Timur

Telp. 0341 591302 Fax. 0341 597032 Website : [www.bbppbatu.bppsdp.deptan.go.id](http://www.bbppbatu.bppsdp.deptan.go.id)

**TAHUN 2012**

## KATA PENGANTAR

Revitalisasi Pertanian ditujukan untuk menjadikan Pertanian sebagai tumpuan kekuatan perekonomian nasional. Sejalan dengan kebijakan tersebut, Kementerian Pertanian telah menetapkan visi pembangunan pertanian sebagai berikut : *"Terwujudnya Pertanian Tangguh untuk Pemantapan Ketahanan Pangan, Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian serta Peningkatan Kesejahteraan Petani"*. Guna mewujudkan visi pembangunan tersebut, diperlukan sumberdaya manusia pertanian, terutama masyarakat yang memiliki ciri profesional, berjiwa wirausaha, berdedikasi, berwawasan global, serta memiliki etos kerja, disiplin dan moral yang tinggi.

Untuk mewujudkan sumberdaya manusia pertanian yang berkualitas dilakukan dengan meningkatkan kualifikasi aparat pertanian khususnya Penyuluh Pertanian. Salah satu strategi untuk meningkatkan kemampuan Penyuluh Pertanian agar dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal adalah diklat dasar fungsional.

Dengan diterbitkannya bahan ajar ini, diharapkan dapat mempermudah peserta diklat memahami dan dapat menyusun prgrama penyuluhan pertanian, sesuai permentan nomor 25 tahun 2009.. Sekiranya dalam bahan ajar ini terdapat hal-hal yang kurang sesuai, demi penyempurnaannya penulis mengharapkan saran dan masukan dari para pembaca.

Akhirnya, semoga tuhan senantiasa meridhoi usaha kita semua, amin.

Batu, Oktober 2011  
Fasilitator,

Sabir

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....		i
DAFTAR ISI.....		ii
BAB I PENDAHULUAN.....		1
A Latar Belakang.....		1
B Deskripsi Singkat.....		2
C Manfaat Bahan Ajar Bagi Peserta.....		2
D Tujuan Pembelajaran.....		2
1. Kompetensi Dasar.....		2
2. Indikator Keberhasilan.....		2
E Materi Pokok dan Sub Materi Pokok.....		3
F Petunjuk Belajar.....		3
BAB II PENGERTIAN, TUJUAN DAN PRINSIP PROGRAMA PP.....		4
A Pengertian Programa Penyuluhan Pertanian.....		4
B Tujuan Programa Penyuluhan Pertanian.....		5
C Prinsip Programa Penyuluhan Pertanian.....		5
D Rangkuman.....		5
E Latihan.....		5
BAB III MEKANISME PENYUSUNAN PROGRAMA PP		6
A Keterkaitan dan Keterpaduan Penyusunan Programa PP dengan Proses Perencanaan Pembangunan.....		6
B Proses Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian.....		8
C Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian Tingkat Desa.....		8
D Rangkuman.....		9
E Latihan.....		9
BAB IV UNSUR-UNSUR PROGRAMA .....		10
A Keadaan.....		10
B Tujuan.....		11
C Masalah.....		11
D Rencana Kegiatan.....		11
E Rangkuman.....		12
F Latihan.....		12
BAB V CARA PENYUSUNAN PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN		13
A Tahapan Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian.....		13
B Matriks Programa Penyuluhan Pertanian.....		13
C Format Programa Penyuluhan Pertanian.....		19
D Rangkuman.....		20
E Latihan.....		20
BAB VI PENUTUP.....		21
A Kesimpulan.....		21
B Implikasi.....		21
C Tindak Lanjut.....		21
DAFTAR PUSTAKA.....		22

## BAB. I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP<sub>3</sub>K) mengamanatkan bahwa penyelenggaraan penyuluhan menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Wewenang dan tanggung jawab pemerintah tersebut diwujudkan antara lain dengan menyelenggarakan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian yang meliputi aspek-aspek penataan kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan.

Agar Revitalisasi Penyuluhan Pertanian dapat berjalan secara produktif, efektif dan efisien, perlu dilakukan identifikasi sumberdaya dan program-program pembangunan pertanian, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat. Hal tersebut diperlukan dalam rangka penyusunan rencana penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang komperhensif dengan memadukan seluruh sumberdaya yang tersedia.

Program penyuluhan pertanian merupakan rencana yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan. Program penyuluhan pertanian yang disusun setiap tahun membuat rencana penyuluhan tahun berikutnya dengan memperhatikan siklus anggaran pada masing-masing tingkatan dengan cakupan pengorganisasian, pengelolaan sumberdaya sebagai pelaksanaan penyuluhan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP<sub>3</sub>K) juga mengamanatkan bahwa program penyuluhan pertanian terdiri dari atas program penyuluhan desa/kelurahan atau unit kerja lapangan, program penyuluhan kecamatan, program penyuluhan kabupaten/kota, program penyuluhan propinsi dan program penyuluhan nasional. agar program penyuluhan ini dapat merespon secara lebih baik aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha diperdesaan, penyusunan program penyuluhan diawali dari tingkat desa/kelurahan.

Program Penyuluhan Pertanian disusun dengan memperhatikan keterpaduan dan kesinergian program penyuluhan pada setiap tingkatan. keterpaduan mengandung maksud bahwa program penyuluhan pertanian disusun dengan memperhatikan program pertanian penyuluhan tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota tingkat propinsi dan tingkat nasional, dengan berdasarkan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha. sedangkan yang dimaksud dengan kesinergian yaitu bahwa program penyuluhan pertanian pada tiap tingkatan mempunyai hubungan yang bersifat saling mendukung. Dengan demikian semua program penyuluhan pertanian selaras dan tidak bertentangan antara program penyuluhan pertanian dalam berbagai tingkatan.

Berbagai permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan program penyuluhan pertanian antara lain sebagai berikut:

- 1) Belum tertibnya penyusunan program penyuluhan pertanian disemua tingkatan;

- 2) Naskah program penyuluhan pertanian belum sepenuhnya dijadikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- 3) Keberadaan penyuluh pertanian tersebar pada beberapa dinas/instansi, baik dipropinsi maupun kabupaten/kota;
- 4) Program penyuluhan pertanian kurang mendapat dukungan dari dinas/instansi terkait;
- 5) Penyusunan program penyuluhan pertanian masih didominasi oleh petugas (kurang partisipatif).

Dengan berlakunya Undang-undang nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) maka program penyuluhan pertanian diharapkan dapat menghasilkan kegiatan penyuluhan pertanian sepsifik lokalita yang strategis dan mempunyai daya ungkit yang tinggi terhadap peningkatan produktivitas komoditas unggulan daerah dan pendapatan petani. Dengan demikian, kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam program penyuluhan pertanian ini akan mampu merespon kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha dan memberikan dukungan terhadap program-program prioritas dinas/instansi terkait.

Programa penyuluhan pertanian ditingkat provinsi, kabupaten/kota kecamatan, dan desa/kelurahan akan menentukan besarnya pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan di Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan bersumber dari APBD yang jumlah dan alokasinya disesuaikan dengan program penyuluhan.

Dengan memposisikan program pertanian secara strategis, maka diharapkan masalah-masalah yang selama ini dirasakan menghambat persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan program penyuluhan pertanian dapat diatasi.

Guna menyediakan acuan bagi seluruh penyelenggara penyuluhan pertanian dipusat dan daerah sebagai dasar persamaan persepsi dalam persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan program penyuluh pertanian, dipandang perlu untuk menerbitkan Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian.

#### **B. Deskripsi Singkat**

Bahan ajar ini berisikan unit-unit kompetensi yang berkaitan dengan Program Penyuluhan Pertanian meliputi: Pengertian, Tujuan dan Prinsip Program Penyuluhan Pertanian, Mekanisme Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian, Unsur-unsur Program Penyuluhan Pertanian, dan Cara Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian.

#### **C. Manfaat Bahan Ajar bagi Peserta**

Membantu peserta memahami Pengertian, Tujuan dan Prinsip Program Penyuluhan Pertanian, Mekanisme Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian, Unsur-unsur Program Penyuluhan Pertanian, dan Cara Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian dan Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian dalam bentuk matriks.

**D. Tujuan Pembelajaran****1. Kompetensi Dasar**

Peserta diklat mampu menyusun program penyuluhan pertanian

**2. Indikator Keberhasilan**

Setelah selesai berlatih peserta diharapkan dapat :

- a. Menjelaskan Pengertian, Tujuan dan Prinsip Program Penyuluhan Pertanian.
- b. Menjelaskan mekanisme Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian.
- c. Menjelaskan Unsur-unsur Program Penyuluhan. Pertanian.
- d. Menjelaskan cara Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian

**E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok****1. Pengertian, Tujuan dan Prinsip Program Penyuluhan Pertanian**

- 1.1. Pengertian Program Penyuluhan Pertanian
- 1.2. Tujuan Program Penyuluhan Pertanian
- 1.3. Prinsip Program Penyuluhan Pertanian

**2. Mekanisme Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian.****3. Unsur-unsur Program Penyuluhan Pertanian.****4. Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian.****F. Petunjuk Belajar**

Agar lebih memahami bahan ajar ini, diharapkan melaksanakan beberapa hal berikut ini:

1. Kerjakan latihan yang ada pada setiap bab di bahan ajar ini.
2. Bentuk kelompok diskusi untuk membahas materi-materi tertentu sehingga diperoleh masukan yang dapat memperluas pemahaman,
3. Kaitkanlah materi yang ada, dengan pengalaman-pengalaman keseharian dalam proses pembelajaran di kelas.

## BAB. II

### PENGERTIAN, TUJUAN DAN PRINSIP PROGRAMAMA PENYULUHAN PERTANIAN

#### Indikator Keberhasilan

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat diharapkan dapat:

1. Menjelaskan pengertian program penyuluhan pertanian
2. Menjelaskan tujuan program penyuluhan pertanian
3. Menjelaskan prinsip program penyuluhan pertanian

#### A. Pengertian

Programa Penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman serta sebagai alat pengendali pencapaian penyuluhan.

Inti program adalah rencana kegiatan penyuluhan pertanian yang disusun melalui sebuah lokakarya partisipatif berdasarkan potensi wilayah dan masalah/kebutuhan pelaku utama (petani, pekebun, peternak) serta dukungan instansi/pihak terkait. Isi dari program ini adalah kegiatan-kegiatan utama dalam penyuluhan pertanian yang akan dilaksanakan di wilayah kerja (desa, BPP, Kabupaten, Provinsi, Nasional) selama satu tahun

Programa penyuluhan memuat rencana penyuluhan tahun berikutnya dengan memperhatikan siklus anggaran masing-masing tingkatan mencakup pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya sebagai dasar pelaksanaan penyuluhan.

#### B. Maksud dan Tujuan

1. Menyediakan acuan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian bagi para penyelenggara.
2. Memberikan acuan bagi penyuluh pertanian dalam menyusun rencana kegiatan penyuluhan pertanian.
3. Menyediakan bahan penyusunan perencanaan penyuluhan untuk disampaikan dalam forum musrenbangtan tahun berikutnya.

#### C. Prinsip-Prinsip Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian

Penyusunan program penyuluhan tersebut harus memenuhi syarat yaitu : Harus terukur, Realistis , Bermanfaat, Dapat dilaksanakan serta dilakukan secara partisipatif, Terpadu, Transparan, Demokratis, Dan bertanggung gugat (anonim, 2006).

- **Terukur** : Program yang disusun dapat diukur keberhasilannya
- **Realistis** : Program yang disusun sesuai dengan keadaan/kenyataan sebenarnya.
- **Bermanfaat** : Program penyuluhan harus memberikan nilai manfaat bagi peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan prilaku untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha.

- **Dapat dilaksanakan** : bahwa program penyuluhan dapat dilaksanakan oleh penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha dalam mencapai tujuan
- **Partisipatif** : penyusunan program melibatkan secara aktif pelaku utama dan plaku usaha dan penyuluh sejak dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
- **Terpadu** : bahwa program penyuluhan yang disusun dengan memperhatikan program penyuluhan kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional dengan berdasar kebutuhan pelaku utama dan plaku usaha.
- **Transparan** : program penyuluhan diselenggarakan secara terbuka antara penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha sehingga dapat diketahui oleh sesama unsur terkait.
- **Demokratis** : penyusunan program yang diselenggarakan dengan saling menghormati pendapat antara penyuluh, pemerintah, dan pelaku utama serta pelaku usaha.
- **Bertanggung gugat** : bahwa evaluasi program penyuluhan dikerjakan dengan membandingkan pelaksanaan yang tlah dilaksanakan dengan perencanaan yang telah dibuat dngan sederhana, terukur, dapat dicapai, rasional, dan kgiatannya dijadwalkan.

#### D. Rangkuman

*Programa Penyuluhan Pertanian* yaitu rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan pertanian.

Inti program adalah rencana kegiatan penyuluhan pertanian yang disusun melalui sebuah lokakarya partisipatif berdasarkan potensi wilayah dan masalah/kebutuhan pelaku utama (petani, pekebun, peternak) serta dukungan instansi/pihak terkait. Isi dari program ini adalah kegiatan-kegiatan utama dalam penyuluhan pertanian yang akan dilaksanakan di wilayah kerja (desa, BPP, Kabupaten, Provinsi, Nasional) selama satu tahun

#### E. Latihan

Jawablah/kerjakan soal latihan berikut :

1. Jelaskan menurut saudara apa yang dimaksud dengan program penyuluhan pertanian serta apa tujuan disusunnya program penyuluhan pertanian ?
2. Jelaskan prinsip-prinsip penyusunan program penyuluhan pertanian ?

## BAB. III

## MEKANISME PENYUSUNAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

## Indikator Keberhasilan

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat diharapkan dapat:  
Menjelaskan mekanisme penyusunan program penyuluhan pertanian

**A. Keterkaitan dan keterpaduan penyusunan program penyuluhan pertanian dengan Proses Perencanaan Pembangunan.**

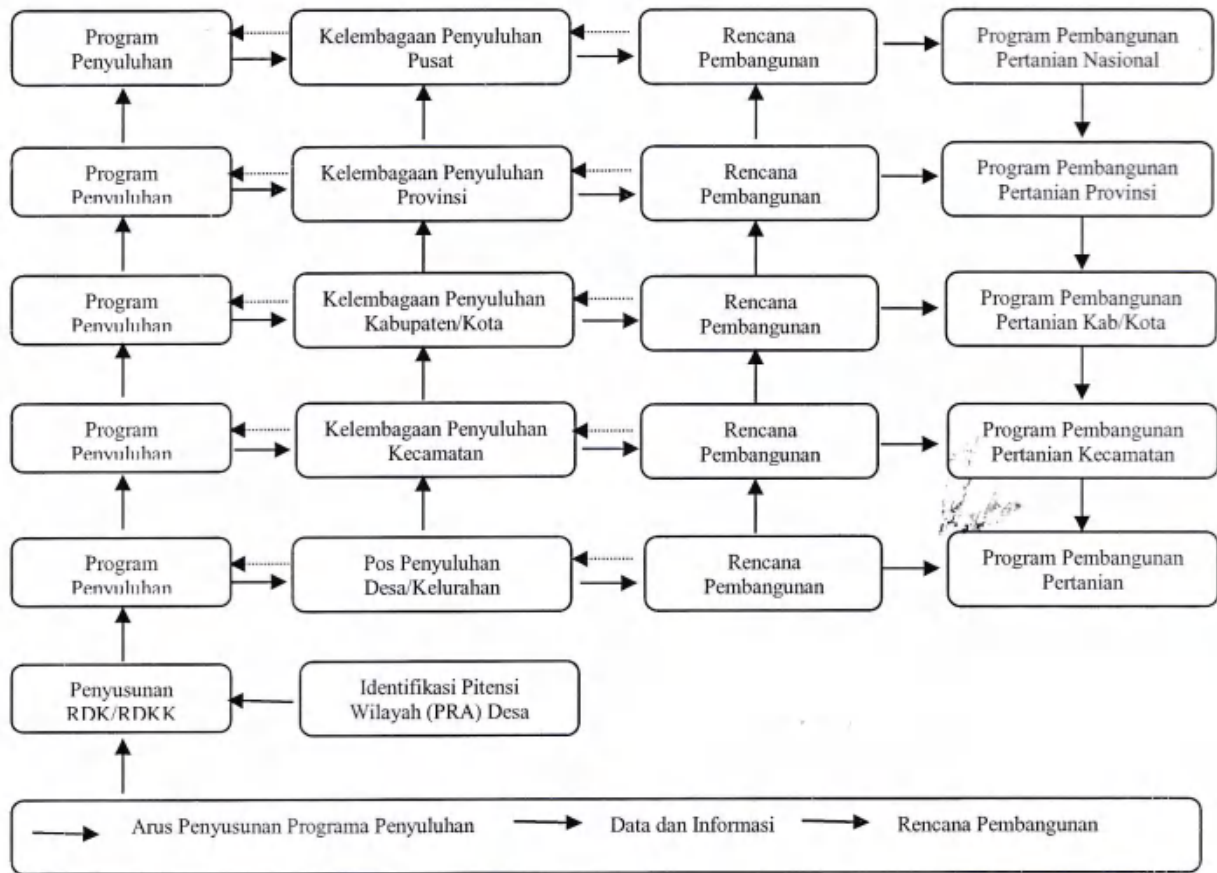
Penyuluhan pertanian terintegrasi dengan subsistem program pembangunan pertanian. Dengan demikian proses penyusunan program penyuluhan pertanian dilakukan secara sinergis dan terpadu dengan proses perencanaan pembangunan pertanian.

Programa penyuluhan pertanian disusun setiap tahun dan memuat rencana penyuluhan pertanian tahun berikutnya dengan memperhatikan siklus anggaran pada masing-masing tingkatan, serta mencakup pengorganisasian dan pengelolaan sumberdaya sebagai dasar penyelenggaraan penyuluh pertanian.

Penyusunan program penyuluhan pertanian dilakukan secara partisipatif untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan pelaku utama dan pelaku usaha. Adapun jumlah dan alokasi pembiayaan kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian yang tercantum pada program penyuluhan dipusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan menjadi dasar dalam penyusunan APBD dan APBN.

Kelembagaan penyuluhan dimasing-masing tingkatan memfasilitasi proses penyusunan program penyuluhan pertanian agar program penyuluhan nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan dapat berlangsung seiring sejalan, serta materi kegiatan penyuluhannya saling mendukung.

Keterkaitan program penyuluhan pertanian dengan perencanaan pembangunan dapat dilihat pada bagan berikut ini:



## B. Proses Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian

Proses penyusunan program penyuluhan, terdiri atas kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Identifikasi program-program pembangunan pertanian dari masing-masing Eselon I lingkup Departemen Pertanian, dinas/instansi lingkup pertanian di provinsi dan kabupaten/kota, serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha. khusus untuk tingkat desa, identifikasi keadaan, masalah dan tujuan digali secara langsung dari pelaku utama dan pelaku usaha di desa melalui metoda/ teknik PRA dan atau teknik lainnya.
2. Sintesa kegiatan penyuluhan pertanian yang ada dalam program pembangunan pertanian menjadi prioritas dari masing-masing Eselon I lingkungan Departemen Pertanian, dinas/instansi lingkup pertanian di provinsi dan kabupaten/kota dengan program kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha untuk menghasilkan draf program penyuluhan pertanian.
3. Penetapan keadaan, masalah, tujuan dan cara mencapai tujuan.
4. Pengesahan program [penyuluhan dilakukan oleh Kepala Balai Penyuluhan, Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten.Kota, Ketua Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi, atau Kepala Badan Penyuluhan sesuai dengan tingkat

administrasi pemerintahan (khusus untuk tingkat desa/kelurahan tidak [erlu disahkan, namun cukup diketahui oleh kepala desa/kelurahan).

5. Pembubuhan tanda tangan pimpinan pemerintahan dimasing-masing tingkatan dan wakil-wakil Eselon I lingkup Departemen Pertanian , dinas/instansi lingkup pertanian di provinsi dan kabupaten/kota pada lembar pengesahan programa penyuluhan pertanian, agar programa penyuluhan pertanian menjadi bagian dari perencanaan pembangunan.
6. Penjabaran programa penyuluhan pertanian kedalam rencana kerja tahunan setiap penyuluh pertanian.
7. Apabila dipandang perlu, dapat dilakukan revisi programa penyuluhan pertanian dan rencana kerja tahunan penyuluh pertanian yang dilakukan setelah keluarnya APBD dan APBN.

### C. Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian Tingkat Desa

- a. Penyuluh pertanian yang bertugas di desa/kelurahan memfasilitasi proses penyusunan programa penyuluhan pertanian tingkat desa/kelurahan.
- b. Apabila di satu desa belum ada penyuluh yang ditugaskan, maka penyusunan programa penyuluhan pertanian di desa/kelurahan tersebut difasilitasi oleh penyuluh pertanian yang wilayah kerjanya meliputi desa/kelurahan.
- c. Penyusunan programa desa/kelurahan dimulai dengan penggalian data dan informasi mengenai potensi desa, monografi desa, jenis komoditas unggulan desa dan tingkat produktivitasnya, keberadaan kelompok tani (GPOKTAN)/Gabungan Kelompok Tani (GPOKTAN), keberadaan kelembagaan agribisnis desa, masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha. Penggalian data dan informasi ini dilakukan bersama-sama dengan tokoh dan anggota masyarakat guna menjaring kebutuhan nyata, harapan dan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha, antara lain dengan menggunakan metode dan instrumen *Participatory Rural Appraisal* (PRA) atau teknik identifikasi keadaan wilayah lainnya.
- d. Hasil penggalian data informasi tersebut merupakan masukan untuk menyusun rencana kegiatan poktan/gapoktan dalam setahun yang mencerminkan upaya perbaikan produktivitas usaha di tingkat kelompoktani/gabungan kelompoktani (Rencana Definitif Kelompok/RDK), yang dilengkapi dengan rincian kebutuhan sarana produksi/usaha yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan rencana tersebut (Rencana Definitif Kebutuhan Kelom[ok/RDKK). Hal ini sekaligus dimaksudkan guna memudahkan penyuluh dalam merekapitulasi kebutuhan sarana produksi dan mengupayakan pemenuhannya secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat sasaran, tepat harga.
- e. Selanjutnya hasil rekapitulasi RDK dan RDKK seluruh poktan/gapoktan di desa akan disintesakan dengan kegiatan-kegiatan dinas.instansi lingkup pertanian yang dialokasikan di desa tersebut.
- f. Sintesa kegiatan POKTAN/GAPOKTAN ditingkat desa dengan kegiatan-kegiatan dinas/instansi lingkup pertanian di desa, sesuai dengan tahapan proses, dilakukan melalui serangkaian pertemuan-pertemuan yang dimotori

oleh para penyuluh pertanian di desa/kelurahan dan dihadiri kepala desa, pengurus kelembagaan pelaku usaha, penyuluh swasta dan penyuluh swadaya yang bertugas di desa.

- g. Program Penyuluhan Pertanian Desa/Kelurahan yang sudah final ditandatangani oleh para penyusun (perwakilan pelaku utama dan pelaku usaha serta penyuluh pertanian), kemudian ditandatangani oleh kepala desa/kelurahan, sebagai tanda mengetahui.
- h. Program Penyuluhan Pertanian Desa/Kelurahan diharapkan telah selesai disusun paling lambat bulan September tahun berjalan, untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya.
- i. Program Penyuluhan Pertanian Desa/Kelurahan yang sudah final disampaikan kepada Balai Penyuluh di Kecamatan sebagai bahan penyusunan program penyuluhan pertanian kecamatan, dan untuk disampaikan dalam Forum Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pembangunan Desa) sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan desa..

#### D. Rangkuman

Program penyuluhan Pertanian disusun setiap tahun dan memuat rencana penyuluhan pertanian tahun berikutnya dengan memperhatikan siklus anggaran pada masing-masing tingkatan.

Penyusunan program penyuluhan dilakukan sebaiknya secara partisipatif untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan pelaku utama dan pelaku usaha.

#### E. Latihan

1. Jelaskan menurut saudara keterkaitan dan keterpaduan penyusunan program penyuluhan dengan perencanaan pembangunan
2. Jelaskan langkah-langkah yang saudara lakukan sebelum menyusun program penyuluhan tingkat desa/kelurahan

## BAB. IV

### UNSUR- UNSUR PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

#### Indikator Keberhasilan

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diklat diharapkan dapat:  
Menjelaskan unsur-unsur program penyuluhan pertanian

#### A. Keadaan

Keadaan yang menggambarkan fakta-fakta berupa data dan informasi mengenai potensi, produktifitas dan lingkungan usaha pertanian, perilaku/tingkat kemampuan petani dan pelaku dalam usahanya di wilayah (Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional). Pada saat akan disusunnya program penyuluhan pertanian dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Potensi Usaha menggambarkan peluang usaha dari hulu sampai hilir yang prospektif untuk dikembangkan sesuai dengan peluang pasar, kondisi agro ekosistem setempat, sumberdaya dan teknologi yang tersedia untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha.
2. Produktifitas usaha menggambarkan perolehan hasil usaha persatuan unit usaha saat ini (faktual maupun potensi perolehan hasil usaha yang dapat dicapai untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha.
3. Lingkungan usaha menggambarkan kondisi ketersediaan sarana dan prasarana usaha (Agroinput, Pasca panen, Pengolahan distribusi dan pemasaran)serta kebijakan yang mempengaruhi usaha pelaku utama dan pelaku usaha.
4. Perilaku berupa kemampuan (pengetahuan, keterampilan dan sikap) pelaku utama dan pelaku usaha dalam penerapan teknologi usaha (teknologi usaha hulu, usaha tani dan teknologi usaha hilir).
5. Kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha menggambarkan keperluan akan perlindungan, kepastian, kepuasan yang dapat menjamin terwujudnya keberhasilan melaksanakan kegiatan usaha pertanian untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

#### B. Tujuan

Tujuan dalam hal ini memuat pernyataan mengenai perubahan perilaku dan kondisi pelaku utama dan pelaku usaha yang dicapai dengan cara menggali dan mengembangkan potensi yang tersedia pada dirinya keluarga dan lingkungan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan merespon peluang.

Prinsip yang digunakan dalam merumuskan tujuannya itu: SMART: *specific (khas); measurable (dapat diukur); actionary (dapat dikerjakan/dilakukan); Realistic (Realistis); dan Time Frame (Memiliki batasan waktu untuk mencapai tujuan).*

hal-hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan tujuan adalah: ABCD: *Audience (khalayak sasaran); Behavior (Perubahan perilaku yang dikehendaki); Condition (Kondisi yang akan dicapai); dan Degree (Derajat kondisi yang akan dicapai).*

### C. Permasalahan

Permasalahan dalam hal ini terkait dengan faktor-faktor yang dinilai dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan atau faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara kondisi saat ini (faktual) dengan kondisi yang ingin dicapai. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Faktor yang bersifat perilaku, yaitu faktor yang berkaitan dengan tingkat adopsi pelaku utama dan pelaku usaha terhadap penerapan suatu inovasi/teknologi baru, misalnya belum yakin, belum mau, atau belum mampu menerapkan dalam usahanya.
2. Faktor yang bersifat non perilaku, yaitu faktor yang berkaitan dengan ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana pendukung usaha pelaku utama dan pelaku usaha, misalnya ketersediaan pupuk benih/bibit atau modal.

Dari sekian banyak permasalahan yang diidentifikasi, perlu dibuat pemeringkatan sesuai dengan prioritas pembangunan pertanian disuatu wilayah, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. apakah masalah itu menyangkut mayoritas para pelaku utama dan pelaku usaha;
- b. apakah erat kaitannya dengan potensi usaha, produktifitas, lingkungan usaha, perilaku, kebutuhan, efektifitas dan efisiensi pelaku usaha; dan
- c. apakah tersedia kemudahan biaya, tenaga, teknologi/inovasi untuk pemecahan masalah.

Penetapan urutan prioritas masalah tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan teknik identifikasi faktor penentu (*impac point*) dan teknik pemeringkatan masalah lainnya.

### D. Rencana Kegiatan

Rencana kegiatan menggambarkan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan, bagaimana caranya, siapa yang melakukan, siapa sasarannya, dimana, kapan, berapa biayanya, dan apa hasil yang akan dicapai untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan merespon peluang yang ada. Untuk merumuskan rencana kegiatan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tingkat kemampuan (pengetahuan, sikap dan keterampilan) pelaku utama dan pelaku usaha;
2. Ketersedian teknologi/inovasi, sarana dan prasarana, serta sumberdaya lain yang mendukung kegiatan penyuluhan pertanian;
3. Tingkat kemampuan (Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap) Penyuluh Pertanian);
4. Situasi lingkungan fisik sosial dan budaya yang ada; dan
5. alokasi pembiayaan yang tersedia.

Rencana kegiatan harus memuat unsur-unsur:

SIADIBIBA: siapa yang akan melaksanakan?; Bilamana/kapan waktu pelaksanaan?; Berapa banyak hasil yang ingin dicapai (Kwantitas dan Kualitas)?; Berapa korbanan yang diperlukan (biaya, tenaga, dll)?; serta Bagaimana melaksanakannya (melalui kegiatan apa)?.

Rencana kegiatan yang disajikan dalam bentuk tabulasi/matriks yang berisi masalah, kegiatan, metode, keluaran, sasaran, volume/frekuensi, lokasi, waktu, biaya, sumber biaya, penanggungjawab pelaksanaan dan pihak terkait.

#### E. Rangkuman

Programa penyuluhan pertanian terdiri dari empat unsur yaitu keadaan, tujuan, masalah dan cara mencapai tujuan. *Keadaan* merupakan fakta yang ditunjukkan oleh data yang terdapat pada saat akan disusunnya suatu program.

Tujuan yaitu pernyataan penyelesaian masalah atau pernyataan apa yang ingin dicapai. Tujuan ditetapkan berdasarkan masalah yang telah dirumuskan petani dan keluarganya. Tujuan dirumuskan untuk menggambarkan perubahan perilaku petani dan keluarganya dalam berusahatani. Unsur-unsurnya dalam tujuan penyuluhan adalah (1) Sasaran (2) Perubahan perilaku yang dikehendaki (3) Materi (4)Kondisi / situasi.

Suatu *wilayah* dikatakan mempunyai masalah kalau ada fakta yang belum memuaskan atau fakta tersebut belum sesuai dengan yang diinginkan. Untuk mengetahui apa masalahnya perlu dianalisis atau diketahui lebih lanjut factor-faktor apa yang menyebabkan keadaan tersebut menjadi tidak memuaskan. Permasalahan adalah rangkaian keterkaitan berbagai masalah dalam suatu bidang tertentu. Masalah bersumber dari (1) Inovasi teknis (2) Inovasi ekonomi (3) Inovasi sosial. Juga ada masalah perilaku dan non perilaku.

Programa penyuluhan pertanian merupakan program pembelajaran yang bertujuan merubah perilaku petani yang berkaitan dengan pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang terjadi karena kehendak mereka sendiri (partisipatif) sehingga masalah yang diambil adalah masalah perilaku bukan non perilaku

Cara mencapai tujuan dirumuskan setelah kita merumuskan tujuan dan masalah dari program. Hubungan antara keadaan, masalah, tujuan, dan cara mencapai tujuan. Cara mencapai tujuan dapat berupa matriks yang berisi masalah, tujuan, materi kegiatan, metode, lokasi, frekuensi, volume, sasaran, pelaksana, waktu, biaya.

#### F. Latihan

1. Jelaskan penetapan keadaan dalam penyusunan program penyuluhan pertanian.
2. Jelaskan penetapan masalah dan sumber masalah serta faktor penyebab masalahnya dalam program penyuluhan pertanian.
3. Jelaskan penetapan tujuan penyusunan program penyuluhan pertanian.
4. Jelaskan menurut saudara apa saja yang perlu diperhatikan dalam merumuskan rencana kegiatan.

## BAB. V.

## CARA PENYUSUNAN PROGRAM PENYULUHAN

## Indikator Keberhasilan

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat diharapkan dapat:

1. Menjelaskan tahapan penyusunan program penyuluhan pertanian
2. Menyusun Program PP dalam bentuk matriks

Penyusunan program penyuluhan dilakukan oleh penyuluh pertanian bersama para pelaku utama dan pelaku usaha serta organisasi petani secara partisipatif, melalui tahapan sebagai berikut:

#### A. Tahapan Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian

##### 1. Perumusan Keadaan

Perumusan keadaan adalah penggambaran fakta berupa data dan informasi disuatu wilayah pada saat program disusun yang diperoleh setelah melakukan pengumpulan dan pengolahan data. Sebelum keadaan dirumuskan, perlu dilakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data mengenai potensi, produktivitas dan lingkungan usaha pertanian, perilaku/tingkat kemampuan pelaku utama dan pelaku usaha, dan kebutuhan pelaku utama dalam usahanya disuatu wilayah. Hasil analisis data dan informasi dapat digali melalui berbagai metode partisipatif, diantaranya PRA (Participatory Rural Appraisal), dari rencana kegiatan pelaku utama dan pelaku usaha (RDK/RDKK) serta dari rekapitulasi program penyuluhan setingkat dibawahnya.

##### 2. Penetapan Tujuan

Penetapan tujuan adalah perumusan keadaan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Tujuan dirumuskan dengan kalimat-kalimat perubahan perilaku pelaku utama dan pelaku usaha yang hendak dicapai. Penetapan tujuan tersebut dilakukan bersama-sama pemerintah, pelaku utama dan pelaku usaha, serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha sehingga rumusan tersebut berupa keinginan dan kepentingan dari kedua belah pihak.

##### 3. Penetapan Masalah

Penetapan masalah adalah perumusan faktor-faktor yang dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan. Faktor-faktor tersebut terutama dicari dari kemampuan pelaku utama dan pelaku usaha dan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha. Faktor-faktor tersebut disusun berdasarkan:

- a. Apakah masalah tersebut menyangkut mayoritas pelaku utama dan pelaku usaha dan organisasi petani.
- b. Apakah erat kaitannya dengan program pembangunan pertanian yang sedang berlangsung di wilayah kerja yang bersangkutan.

- c. Apakah kemamouan (biaya, tenaga, peralatan, dsb) tersedia untuk pemecahan masalah. Urutan prioritas masalah dapat dilakukan dengan menggunakan teknik faktor penentu (*impac-point*) atau teknik peningkatan masalah lainnya.

Selain itu, penetapan masalah dilakukan secara partisipatif dengan merujuk pada hasil identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan.

Penetapan Masalah dilakukan dengan tahapan:

- a. Menetapkan kriteria untuk menetapkan prioritas (melibatkan banyak pelaku utama dan pelaku usaha, sebaran lokasi luas, kerugian yang diakibatkan tinggi, kemudahan untuk mengatasi masalah, mendesak/penting);
- b. Menetapkan skoring/pembobotan untuk setiap kriteria sesuai dengan kesepakatan;
- c. Melakukan penilaian terhadap setiap masalah berdasarkan skoring;
- d. Menetapkan prioritas masalah.

#### 4. Penetapan Rencana Kegiatan

Pada tahap ini dirumuskan cara mencapai tujuan, yaitu menetapkan rencana kegiatan yang menggambarkan bagaimana tujuan bisa dicapai. Ada dua rencana yang harus disusun, yaitu :

- a. Rencana kegiatan penyuluhan yang meliputi data dan informasi mengenai tujuan, masalah, sasaran, lokasi, metode/kegiatan, waktu, lokasi, biaya dan penanggungjawab serta pelaksana. Masalah dalam rencana kegiatan penyuluhan berupa masalah-masalah yang bersifat perilaku, yang antara lain bisa disidik (identifikasi) berdasarkan teknik faktor penentu.
- b. Rencana kegiatan untuk membantu mengikhtiarkan pelayanan dan pengaturan yang meliputi data dan informasi mengenai tujuan, sasaran, lokasi, kenis kegiatan, waktu, penanggungjawab serta pelaksana. Masalah petani bersifat non perilaku antara lain masalah-masalah yang berkaitan dengan kondisi sarana dan prasarana usahatani, pembiayaan, pengaturan, pelayanan dan kebijakan pemerintah/iklim usaha yang kurang kondusif.

#### B. Matriks Programa Penyuluhan Pertanian

Rumusan keadaan. Tujuan, masalah dan rencana kegiatan yang telah ditetapkan selanjutnya dituangkan dalam bentuk matriks, seperti contoh berikut ini.

Handwritten mark or signature

Handwritten mark or signature

## PENJELASAN MATRIK PROGRAM PENYULUHAN

1. Kolom ini diisi nomor urut rumusan keadaan

**2. Keadaan:**

Kolom ini berisi uraian singkat mengenai status pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan pertanian secara umum yang berkaitan dengan tingkat produktivitas usaha pertanian di suatu wilayah.

**3. Tujuan:**

Kolom ini berisi uraian singkat mengenai upaya yang akan ditempuh untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan pertanian secara umum, khususnya yang berkaitan dengan perubahan perilaku pelaku utama dan pelaku usaha serta seluruh pemangku kepentingan dalam peningkatan produktivitas usaha pertanian di suatu wilayah.

**4. Masalah :**

Kolom ini berisi uraian singkat mengenai faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya tujuan pembangunan pertanian yang diharapkan, baik yang bersifat perilaku maupun non perilaku, yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha serta seluruh pemangku kepentingan dalam peningkatan produktivitas usaha pertanian di suatu wilayah.

**5 Sd 11. Sasaran :**

Kolom ini menjelaskan mengenai siapa yang direncanakan untuk mendapat manfaat dari penyelenggaraan suatu kegiatan/metode penyuluhan pertanian di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, atau desa/kelurahan, yaitu :

- a. Pelaku usaha, pelaku utama dan kelembagaan petani (untuk program penyuluhan di semua tingkatan).
- b. Penyuluh dan petugas dinas/instansi lingkup pertanian yang bertugas setingkat di bawah wilayahnya, serta pemangku kepentingan lainnya (untuk program penyuluhan di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional).

Penetapan sasaran perlu dilakukan berdasarkan hasil analisis gender yang dilakukan terhadap pelaku utama dan pelaku usaha pertanian ditingkat rumah tangga petani dan masyarakat pedesaan pada umumnya, khususnya untuk menentukan "siapa melakukan apa" dan "Siapa memutuskan apa?". Dengan demikian, sasaran penyelenggaraan suatu kegiatan/metode penyuluhan akan menjadi lebih spesifik karena diarahkan langsung kepada petani dengan penjelasan laki-laki perempuan atau keduanya yang berdasarkan hasil analisis gender merupakan pelaku kegiatan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari bias gender dan distorsi pesan akibat penyamarataan sasaran yang dilakukan tanpa mempertimbangkan peran masing-masing (laki-laki atau perempuan) dalam kegiatan usaha, maupun dalam pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan usahanya.

**12 Materi**

Kolom ini berisi mengenai jenis informasi teknologi yang menjadi pesan bagi sasaran baik dalam bentuk pedoman-pedoman, petunjuk teknis suatu komoditas tertentu dan lain-lain.

**13. Kegiatan/Metode**

Kolom ini berisi kegiatan-kegiatan atau metode penyuluhan yang dapat memecahkan masalah untuk mencapai tujuan.

**14. Volume**

Kolom volume berisi mengenai jumlah dan frekwensi kegiatan yang akan dilakukan agar sasaran dapat memahami dan melaksanakan pesan yang disampaikan melalui kegiatan/metode penyuluhan, atau agar terjadinya perubahan perilaku pada sasaran.

**15. Lokasi**

Kolom ini memuat mengenai lokasi kegiatan penyuluhan yang akan dilaksanakan (desa, kecamatan, kabupaten/kota,dll).

**16. Waktu**

Kolom ini berisikan mengenai waktu pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam program penyuluhan.

**17. Sumber Biaya**

Kolom sumber biaya diisi mengenai beberapa biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan yang ditetapkan, serta dari mana sumber biaya yang tersebut diperoleh.

**18. Penanggungjawab**

Kolom ini berisi mengenai siapa penanggung jawab pelaksanaan kegiatan penyuluhan, sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dapat dengan jelas diminta pertanggung jawaban.

**19. Pelaksana**

Kolom ini berisi mengenai siapa yang melaksanakan kegiatan-kegiatan penyuluhan tersebut, apakah dilakukan oleh penyuluh, petani/kontaktan dan/atau pelaku usaha.

**20. keterangan**

Kolom ini berisi uraian mengenai hsl-hsl yang perlu dijelaskan tentang pihak-pihak yang diharapkan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.

**C. FORMAT PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN****I. Pendahuluan**

Dalam bab pendahuluan diuraikan informasi yang melatarbelakangi perlunya penyusunan program penyuluhan disuatu tingkatan wilayah (pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, atau desa/kelurahan).

**II. Keadaan Umum**

Dalam bab ini gambarkan mengenai potensi sumberdaya pembangunan pertanian secara umum dan sumberdaya yang erat kaitannya dengan penyuluhan

pertanian dan merupakan bagian dari program-program pembangunan pembangunan pertanian disuatu tingkat wilayah (pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, atau desa/kelurahan) yang perlu didukung dengan data informasi yang menunjang, baik kualitatif dan kuantitatif.

### III. Tujuan

Dalam bab ini digambarkan pernyataan mengenai perubahan pengetahuan, wawasan, sikap dan perilaku usaha, pelaku utama, kelembagaan petani, penyuluh dan petugas dinas/instansi lingkup pertanian serta pemangku kepentingan yang akan dicapai untuk berubah potensi sumberdaya pembangunan pertanian ditingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, atau desa/kelurahan menjadi peluang yang nyata dan bermanfaat untuk peningkatan produktivitas, pendapat, dan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini menggambarkan target yang secara realistis dapat dicapai dalam kurun waktu setahun.

### IV. Masalah

Dalam bab ini digambarkan faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya tujuan pembangunan pertanian yang diharapkan. Uraian ini dimulai dengan analisa permasalahan yang bersifat non perilaku yang menghambat pencapaian tingkat ptoduktivitas, baik yang berkaitan dengan aspek kebijakan, sarana/prasarana, pembiayaan, maupun pengaturan dan pelayanan. Selanjutnya analisa non perilaku ini diikuti dengan analisa perilaku yang berkaitan dengan pengetahuan, wawasan, sikap dan perilaku pelaku utama, pelaku usaha, kelembagaan petani, penyuluh dan petugas dinas/instansi lingkup pertanian, serta seluruh pemangku kepentingan yang menjadi kendala dalam pencapaian tujuan pembangunan pertanian yang diharapkan.

### V. Rencana Kegiatan Penyuluhan

Dalam bab ini menggambarkan berbagai kegiatan/ metode penyuluhan yang dipandang tepat untuk mentransformasi terjadinya perubahan pengetahuan, wawasan, sikap dan perilaku pelaku utama dan pelaku usaha serta seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Secara lengkap rencana kegiatan penyuluhan ini dituangkan dalam bentuk matriks programa penyuluhan yang mengisi mengenai keadaan, tujuan, masalah, sasaran (*target beneficiaries*), materi, kegiatan/metoda, volume, lokasi, waktu, sumber biaya, pelaksana dan penanggung jawab.

Kegiatan-kegiatan yang bersifat non perilaku , misalnya kegiatan-kegiatan untuk membantu/mengikhtiarkan kemudahan bagi pelaku utama, pelaku usaha, kelembagaan petani, yang berkaitan dengan aspek kebijakan, sarana/prasarana, pembiayaan, pengaturan dan pelayanan, dituangkan dalam bentuk matriks (terlampir). Kegiatan-kegiatan tersebut selanjutnya diusulkan dalam Forum Musyawarah perencanaan pembangunan tahun yang berjalan disetiap tingkatan

wilayah untuk mendapat dukungan dari dinas/instansi lingkup pertanian dan dinas/instansi terkait.

#### D. Rangkuman

Inti program adalah Rencana Kegiatan Penyuluhan Pertanian yang disusun melalui sebuah *lokakarya partisipatif* berdasarkan potensi wilayah dan masalah/kebutuhan petani serta dukungan instansi/pihak terkait. Isi dari program ini adalah kegiatan-kegiatan utama dalam penyuluhan pertanian yang akan dilaksanakan di wilayah kerja penyuluhan pertanian selama satu tahun.

Sesuai dengan rumusan pengertian program penyuluhan pertanian, maka penulisan penyusunan program dapat disusun sebagai berikut, yaitu : Perumusan keadaan, penetapan tujuan, penetapan masalah, penetapan rencana kegiatan, rencana monitoring dan evaluasi

Penyusunan program penyuluhan pertanian sangatlah penting bagi seorang penyuluh karena program penyuluhan merupakan program yang disusun setiap tahun memuat rencana penyuluhan tahun berikutnya dengan memperhatikan siklus anggaran pada masing-masing tingkatan dengan cakupan pengorganisasian, pengelolaan sumberdaya sebagai pelaksanaan penyuluhan.

#### E. Latihan

1. Jelaskan tahapan penyusunan program penyuluhan pertanian berdasarkan permentan 25 tahun 2009.
2. Isilah matriks program penyuluhan pertanian tingkat desa sesuai dengan form !
3. Masalah-masalah apa yang saudara temukan pada wilayah kerja saudara dan bagaimana solusinya sehingga permasalahan tersebut dapat terpecahkan !

## BAB VI

### PENUTUP

---

#### A. Kesimpulan

Tolok ukur keberhasilan membangun perilaku profesional petani dalam mengembangkan usaha agribisnis dapat diukur dari tingkat dinamika para pelakunya ditinjau dari jenis, bentuk, kualitas serta derajat partisipasinya pada setiap aspek kegiatan dalam sistem agribisnis.

Programa Penyuluhan Pertanian adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan pertanian. Rencana tentang kegiatan penyuluhan pertanian yang memadukan aspirasi petani dan masyarakat pertanian dengan potensi wilayah dan program pembangunan pertanian, yang menggambarkan keadaan sekarang, tujuan yang ingin dicapai, masalah dan alternatif pemecahannya serta cara mencapai tujuan yang disusun secara partisipatif, sistematis dan tertulis setiap tahun.

Penyusunan programa Penyuluhan Pertanian didasarkan pada Undang-undang no 16 tahun 2006 yaitu bahwa programa penyuluhan terdiri atas programa penyuluhan desa/kelurahan atau unit kerja lapangan, programa penyuluhan kecamatan, programa penyuluhan kabupaten/kota, programa penyuluhan propinsi, dan programa penyuluhan nasional.

#### B. Implikasi

Peserta diklat bersama dengan stake holder dapat menyusun programa penyuluhan pertanian diwilayah kerjanya sesuai amanat permentan 25 tahun 2009.

#### C. Tindak Lanjut

Setelah menerapkan pengetahuan ini dalam kegiatan pembelajaran, pasti akan menemui banyak kendala, dan permasalahan-permasalahan baru di lapangan. Untuk itu para penyuluh harus selalu mengembangkan diri, untuk selalu belajar, mengadakan inovasi sehingga perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi penyuluhan pertanian dapat berjalan dengan baik dan akhirnya didapatkan hasil yang optimal

## DAFTAR PUSTAKA

1. Anonim. 2009. *Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian*, Departemen Pertanian
2. Anonim. 2000. *Perumusan Programa Penyuluhan Pertanian*, Departemen Pertanian.
3. Anonim. 2003. *Proses Penyuluhan Kemitraan*, Departemen Pertanian.
4. Anonim. 2006. *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan*. Departemen Pertanian

---

**BIODATA PENULIS**


---



Sabir, Lahir di Bilokka Sidrap Sulawesi Selatan 14 Mei 1964, sebagai putra pertama dari enam bersaudara. Pendidikan SD di Bilokka (1977), SLTP di Bilokka (1981), SLTA di SPP Snakma Negeri Rappang (1984), D3 jurusan Penyuluhan Peternakan di APP Malang (1995), S1 Peternakan jurusan Nutrisi dan Makanan Ternak di Fakultas Peternakan Universitas Muhammadiyah Parepare (2002). S2 Program Studi Agribisnis di Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Parepare

(2009) Tenaga Fungsional Penyuluh Pertanian bidang teknis peternakan sejak tahun 1984-2002, Guru SPP Polmas (1986-1990) Kepala Seksi Produksi Perikanan (2002–2003) dan Kepala Seksi Pembibitan dan Pengembangan ternak (2003–2005) pada dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang, Sebagai kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian Kabupaten pada Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang (2005-2009), Fungsional umum pada Balai Besar Pelatihan Peternakan-Batu Jawa Timur sejak 2009 sampai sekarang. Selain pendidikan formal tersebut, penulis juga telah banyak mengikuti pendidikan dan Latihan antara lain; Pelatihan Petugas Peternakan, Dasar Teknik Peternakan, Ternak Unggas, PLP Perkoperasian Broiler Layer, Inseminasi Buatan, Training Of Trainer, Teknis Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Ternak , Training Officer Course (TOC), TOT sertifikasi Penyuluh Pertanian dll. Penghargaan yang telah diterima penulis antara lain adalah Sebagai Penyuluh Pertanian terbaik II se kabupaten Polmas (1990), Penyuluh Peternakan Berprestasi tingkat Nasional (1993), Satya Lencana 10 Tahun (2001), PNS Teladan tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang (2004) dan Penyuluh Pertanian berprestasi tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang (2007).

Contoh: PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN  
BPP JUNREJO KOTA BATU  
TAHUN 2013

No	Keadaan	Tujuan	Masalah	Sasaran					KEGIATAN PENYULUHAN							Ket.			
				Pelaku Utama		Pelaku Usaha		Petugas		Materi	Kegiatan/ Metoda	Vol.	Lokasi	Waktu	Sumber Biaya		Penanggung Jawab	Pelaksana	
				Wanita Tani	Taruna Tani	Petani Dewasa	L	P	L										P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Pelaku utama belum melakukan vaksinasi ND pada ayam buras secara rutin	Pelaku utama melakukan vaksinasi ND pada ayam buras secara rutin	Kurangnya kesadaran pelaku utama melakukan vaksinasi ND pada ayam buras	5 klp	5 klp	15 klp	5 org	-	1 org	1 org	Vaksin asi ND	Ceramah dan diskusi, demcar	25x	Klp tani.... ..... Sda	Maret sd Juli  Sda	Swadana	Penyuluh	Ketua klp	KCD Nak
2	Pelaku utama belum menerapkan sistem pemerahan yang tepat pada sapi perah	Pelaku utama melakukan pemerahan yang tepat pada sapi perah	Pelaku utama belum tahu melakukan pemerahan yang tepat pada sapi perah	-	-	5 klp	1	-	1	-	Pemerahan	Demcar	5 x	Klp.... .....	April	Swadana	Penyuluh	Ketua klp	-

Mengetahui:  
Kepala BP4K Kab.....

Penyuluh,

Latihan

Nama :

Kondisi/Fakta :

No	Keadaan	Tujuan	Masalah	Materi	Metode

*Handwritten signature*



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

**BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN - BATU**

Jln. Songgoriti No. 24 Kotak Pos 17 Batu - Jawa Timur  
Telp. 0341 591302 Fax. 0341 597032 Website : [www.bbpbatu.bppsdp.deptan.go.id](http://www.bbpbatu.bppsdp.deptan.go.id)